

# **PENDIDIKAN DASAR INKLUSIF DI KABUPATEN PATI: Harapan dan Kenyataan**

**SULTHON**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus**

**sulthonzainur@gmail.com**

## ***Abstract***

*This study examines the implementation of inclusive elementary education in Pati district. Data collection was carried out through interviews and observations of eight students with disabilities who attended inclusive elementary schools in Pati Regency, 6 teachers, and 3 school principals. Data analysis was performed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of inclusive basic education in Pati Regency is not under idealized conditions because in its implementation the school still limits students with disabilities who are accepted. Schools only accept those who have non-physical disabilities (intellectual disability, slow learning, and sensory disabilities). School considerations are: 1) easy in learning services; 2) worry if parents of non-disabled students refuse and move their children to another school; 3) there are obstacles in learning services because they do not have special support teachers and the lack of inclusive learning facilities and infrastructure.*

**Keywords: inclusive education; inclusive elementary schools; inclusive education in Pati; students with mental disability**

### **Abstrak**

Makalah ini meneliti pelaksanaan pendidikan dasar inklusif di kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap delapan siswa difabel yang bersekolah di SD inklusif di Kabupaten Pati, 6 guru, dan 3 kepala sekolah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar inklusif di Kabupaten Pati belum sesuai dengan kondisi yang diidealkan karena dalam pelaksanaannya sekolah masih membatasi siswa difabel yang diterima. Sekolah hanya menerima mereka yang mengalami disabilitas non-fisik saja (disabilitas intelektual, lambat belajar, dan disabilitas sensorik). Pertimbangan sekolah adalah: 1) mudah dalam layanan pembelajaran; 2) merasa khawatir jika orang tua siswa non-difabel menolak dan memindahkan anaknya ke sekolah lain; 3) adanya kendala dalam layanan pembelajaran karena tidak memiliki guru pembimbing khusus, dan kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran inklusif.

**Kata kunci:** pendidikan inklusif; SD inklusif; sekolah inklusif di Pati; pendidikan penyandang disabilitas mental.

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk siswa difabel atau anak berkebutuhan khusus. Hak untuk mendapatkan pendidikan dijamin Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, Ayat 2, 4, dan 6 serta dikukuhkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 1, 2, dan 3. Dilandasi juga UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 24 Ayat 1 bahwa negara mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak pendidikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, negara harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada

setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah, dan didukung lagi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 10. Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Melalui pendidikan inklusi, siswa difabel lebih berkesempatan mendapatkan pendidikan karena mereka dapat diterima di sekolah umum bersama dengan anak non difabel di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun dalam realitasnya siswa difabel masih belum bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan secara merata dan adil, karena masih banyak kendala atau hambatan (Maftuhin, 2018, hlm. 292) baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal.

Hambatan internal berkaitan dengan guru reguler yang tidak siap menghadapi siswa difabel dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk mengajar siswa difabel (Pratiwi, 2016, hlm. 26) maupun kendala terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (Evanjeli, 2015, hlm. 2; Zakia, 2015, hlm. 115) dan belum siapnya pihak sekolah untuk menerima siswa difabel. Sedang hambatan eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti sangat terbatas fasilitas yang memadai bagi siswa difabel untuk mendapatkan pendidikan (Depdiknas, 2005).

Pemerintah mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) namun belum dapat menuntaskan pemerataan pendidikan bagi siswa difabel disebabkan jumlahnya sangat terbatas dan tempatnya jauh, sehingga tidak terjangkau bagi siswa difabel yang ada di pelosok desa (Asiyah, 2018, hlm. 71). Faktanya dari 1.874.948 anak difabel di Indonesia baru 85.737 anak yang mengenyam pendidikan (25,92%), sedang masih 245.027 anak (74,08%) anak difabel belum mendapatkan Pendidikan (Kemendikbud, 2017). Dengan demikian membangun sekolah

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

inklusi merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan mengingat dua hal: pertama, masalah pendidikan bagi siswa difabel tidak dapat teratasi melalui sekolah khusus; kedua, pendidikan bagi siswa difabel sangat urgen dan berguna dalam meningkatkan potensi yang masih dimiliki serta membantu menyiapkan kemandirian dalam hidup (Pratiwi, 2016, hlm. 26).

Pendidikan inklusif secara umum masih belum berjalan hampir di Indonesia. Di Yogyakarta, misalnya, pendidikan inklusif tidak berjalan sebagaimana mestinya (Evanjeli, 2015, hlm. 2). Di Kabupaten Bantul, sejumlah 66,6% SD inklusif sudah sesuai dengan prinsip sekolah inklusif, sedangkan 33,4% masih jauh dari harapan (Lela Mustika, 2017, hlm. 85). Di Sukoharjo pendidikan inklusif masih kekurangan guru pendamping khusus (Zakia, 2015, hlm. 115). Adapun di Pati, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Gabus 01, SDN Langenharjo 02, SDN Kalimulyo 01, dan SDN Puncakwangi 03 belum sepenuhnya menerima siswa difabel, karena hanya menerima difabel ringan dan dengan hambatan non-fisik (disabilitas intelektual, anak lambat belajar, dan disabilitas sensorik). Adapun difabel fisik seperti tunanetra, Tuli, dan tunadaksa belum dapat diterima dengan alasan mereka tidak memiliki guru pembimbing khusus.

Hal ini juga diperburuk dengan adanya perubahan pengelolaan sekolah khusus yang awalnya ditangani Dinas Pendidikan Kabupaten yang berubah pembinaannya menjadi di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Akibatnya pembinaan guru reguler, yang awalnya ditangani Balai Pengembangan Pendidikan Khusus (BP Diksus) Provinsi, menjadi terhenti.

Kurangnya guru pembimbing khusus (GPK) sering menjadi penyebab utama berjalan tidaknya sekolah inklusif. GPK adalah guru khusus yang berlatar belakang Sarjana Pendidikan Luar Biasa atau guru yang sudah mendapatkan latihan khusus mengajar siswa difabel (Zakia, 2015, hlm. 112). Dengan demikian tidak berjalannya sekolah inklusif berarti siswa difabel yang tidak dapat bersekolah di sekolah khusus akan terhenti dan tidak punya harapan dapat sekolah lagi.

Berdasarkan persoalan di atas dan pentingnya sekolah inklusif bagi siswa difabel, maka dapat dikemukakan permasalahan penelitian: 1)

bagaimana pelaksanaan sekolah dasar inklusi di Kabupaten Pati?; 2) apa kendala yang dihadapi sekolah dasar inklusi di Kabupaten Pati?; dan 3) bagaimana upaya yang dilakukan sekolah dasar inklusi di Kabupaten Pati untuk mewujudkan pendidikan inklusif?.

Hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas persoalan mendasar yang dihadapi terkait dengan kegagalan pendidikan inklusif selama ini, sehingga dapat menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan program pendidikan inklusif baik bagi pemerintah pusat, daerah maupun lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan bagi siswa difabel dapat tercapai dengan cepat.

Penelitian tentang pendidikan inklusif secara umum sudah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian Abd. Kadir tentang penyelenggaraan sekolah inklusif di Indonesia. Penelitian ini belum menjawab mengapa sekolah inklusif dan bagaimana mengusahakan kesuksesan sekolah inklusif tidak dilakukan (Kadir, 2016, hlm. 63). Penelitian semisal dilakukan oleh Juang Sunanto tentang inklusi dalam pembelajaran di kelas yang terdapat siswa difabel di Sekolah Dasar. Ia menyoroti pembelajaran inklusif di kelas dan keberadaan guru namun tidak membahas tentang kendala dan solusi (Sunanto, 2016, hlm. 83). Penelitian lainnya dilakukan oleh Jamilah Candra Pratiwi tentang sekolah inklusif untuk siswa difabel: tantangan ke depannya. Penelitian ini membahas sekolah inklusi dan tantangan ke depan tetapi tidak mengkaji pelaksanaan dan upaya penyelesaian terhadap kendala sekolah inklusif (Pratiwi, 2016, hlm. 242).

Adapun penelitian yang berhubungan dengan pendidikan inklusif dan kendala-kendalanya ditemukan pada penelitian berikut: Pertama, penelitian Dieni Laylatul Zakia (2015, hlm. 115) tentang guru pembimbing khusus (GPK): pilar pendidikan inklusif SD inklusif di Kabupaten Sukoharjo. Penelitiannya menunjukkan bahwa di Sukoharjo, SD inklusif masih kekurangan guru pembimbing khusus (GPK) sehingga siswa difabel belum mendapatkan layanan pembelajaran secara maksimal sesuai kemampuannya.

Kedua, penelitian Paramita Isabella, Emosda, dan Suratno (Isabella, Emosda, & Suratno, 2014, hlm. 56) tentang evaluasi penyelenggaraan

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas di SDN 131/IV Kota Jambi. Penelitiannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi siswa difabel di SD Negeri 131/IV Kota Jambi tergolong dalam kriteria baik, dengan perbandingan 68,35% dan 31,35%.

---

**INKLUSI:**

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

Ketiga, penelitian Miftahurrohmah tentang pembinaan guru Sekolah Dasar Inklusi di SD Negeri Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo dan SDN Trangkil 06 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Ia menunjukkan bahwa pembinaan guru di SD inklusif dilakukan oleh provinsi, kabupaten, dan sekolah dalam wujud penataran, pelatihan serta workshop, sedang di sekolah dengan cara *sharing*. Ia juga menemukan hambatan berupa SDM dan pendanaan (Miftahurrahmah, 2017, hlm. 96).

Keempat, penelitian Nissa Tarnoto (Tarnoto, 2016, hlm. 51) tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tingkat SD di wilayah Kota Yogyakarta, menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan yang berhubungan dengan kesiapan sekolah seperti rendahnya kemampuan guru dalam melayani siswa difabel dan rendahnya perhatian orang tua siswa difabel dan masyarakat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, datanya dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedang teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif karena dipandang lebih sesuai dengan data yang dikumpulkan dengan langkah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion and verification* (Sugiyono, 2009, hlm. 247–252).

Observasi dan wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru yang memegang kelas siswa difabel, dan siswa difabel di SDN Gabus 01 Kecamatan Gabus, SDN Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo, SDN Kalimulyo 01 Kecamatan Jakenan, dan SDN Puncakwangi 03 Kecamatan Puncakwangi, sejumlah 16 responden yaitu, 3 kepala sekolah, 5 guru, dan 8 siswa difabel dengan menggunakan panduan observasi dan wawancara berdasarkan nilai-nilai inklusi dalam pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas inklusi.

## **B. Pendidikan Inklusif: Harapan dan Kenyataan**

Pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang menerima siswa difabel belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah umum. Dalam makna yang lain merupakan praktik pendidikan yang ramah siswa difabel, tidak diskriminasi, menekankan pada pemberian kesempatan, hak, keadilan, dan pemerataan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali siswa difabel untuk mencapai wajib belajar 9 tahun (UU No. 19 tahun 2011 Pasal 24 Ayat 1; UU No. 8 tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 10).

Pendapat lain, pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak membedakan anak karena keadaan fisik, mental-intelektual, sosial, potensi dan kecerdasan, yang berbeda untuk belajar bersama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan bersama di sekolah yang sama (Junanto & Kusna, 2018, hlm. 179; UNESCO, 1994). Secara teoritis, inti pendidikan inklusif adalah sekolah yang menerima keragaman dan perbedaan dengan memberikan pendidikan bagi semua anak dengan berbagai penyesuaian pembelajaran dan kurikulum serta sumber belajar yang berguna bagi semua anak sehingga tercipta kebersamaan dan lebih terjangkau (Rakhmawati, 2002, hlm. 19).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif memang sangat ideal dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa difabel, karena mengandung banyak manfaat. Pertama, pendidikan inklusif diadakan di sekolah yang dekat dengan siswa difabel. Hal ini mengurangi atau dapat menjadi solusi tercapainya pemerataan pendidikan bagi mereka yang selama ini tak tercapai dengan adanya sekolah khusus (SLB dan SDLB). Kedua, pendidikan inklusif dapat menghilangkan sekat diskriminasi antara anak non-difabel dan difabel karena mereka dapat berada di sekolah yang sama, berinteraksi dan bermain bersama tanpa adanya perbedaan. Ketiga, siswa difabel dapat belajar berinteraksi dalam lingkungan masyarakat secara normal, yang akhirnya mereka dapat hidup bermasyarakat secara normal. Hal ini berbeda dengan sekolah khusus yang menjadikan siswa difabel eksklusif dan terasing sehingga mereka akan merasa canggung dalam hidup bermasyarakat. Keempat, sekolah inklusif memiliki nilai terapi sosial psikologis. Dengan diterimanya difabel di

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,*

*Vol. 6, No. 1*

*Jan-Jun 2019*

sekolah umum, siswa difabel akan belajar, bermain, dan bekerja bersama dengan anak sebayanya yang non-difabel sehingga akan meningkat rasa percaya dirinya dan keterikatan sosialnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Jamilah bahwa sekolah inklusif memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologis siswa difabel, yaitu memupuk rasa aman, menilai dirinya positif (*self concept*), harga diri (*self esteem*), serta kepercayaan diri anak (*self confident*) (Pratiwi, 2016, hlm. 239).

Empat manfaat di atas menunjukkan bahwa sekolah inklusif memang ideal bagi anak difabel. Namun realitasnya, pelaksanaan sekolah inklusif belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga siswa difabel tetap masih banyak yang belum dapat bersekolah. Dengan kata lain sekolah inklusif dalam implementasinya belum berfungsi bagi peningkatan jumlah siswa difabel terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik yaitu: 1) pendidikan inklusif adalah proses yang terjadi secara bertahap untuk memberikan pendidikan tanpa membedakan; 2) pendidikan inklusif bermakna ramah dalam pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan anak; 3) pendidikan inklusif memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi dan mencapai hasil belajar yang bermanfaat dalam kehidupannya; dan 4) pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar (Depdiknas, 2005, hlm. ii).

Pendidikan inklusif telah dirancang pemerintah sejak tahun 2009, namun dalam praktiknya hingga kini belum terlalu terlihat hasilnya. Secara umum sekolah inklusif belum berjalan karena banyaknya kendala (Maftuhin, 2018, hlm. 292). Baik kesiapan sekolah untuk menerima siswa yang beragam, guru-guru umum belum siap dalam mengajar siswa difabel, terbatasnya guru pembimbing khusus, tidak fleksibelnya kurikulum inklusi, dan terbatasnya sarana prasarana (Pratiwi, 2016, hlm. 26).

Singkatnya sekolah inklusif dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik, berbagai kendala di atas menjadi bukti bahwa program sekolah inklusif masih bersifat idealis. Kendala yang dihadapi di masing-masing daerah tentunya tidak sama. Secara umum kendala pendidikan

inklusif sebagaimana hasil penelitian didapat sebagai berikut: terbatasnya guru pendamping khusus (GPK) sebesar 27,39%, rendahnya kompetensi guru dalam mengajar siswa difabel sebanyak 19,64%, kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran (KBM) sebanyak (17,86%), lemahnya guru dalam pemahaman tentang siswa difabel dan sekolah inklusif sebanyak (16,67%), latar pendidikan guru tidak relevan (5,95%), beban administrasi guru di sekolah inklusif semakin tinggi (5,36%), rendah kesabarannya dalam menghadapi siswa difabel (2,39%) dan kurang menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua siswa (1,78%) (Asiyah, 2018, hlm. 71; Tarnoto, 2016, hlm. 55).

---

*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

### **C. SD inklusif di Kabupaten Pati**

Kabupaten Pati memiliki 13 SD inklusif yang tersebar di tiga belas kecamatan yaitu, kecamatan Margoyoso, Jakenan, Gabus, Trangkil, Dukuh Sekti, Winong, Puncakwangi, Batangan, Margorejo, Pati kota, Tayu, Tambakromo, dan Kayen. Sedang dalam penelitian ini diambil 4 SD inklusif dengan pertimbangan: pertama, lokasi yang dekat dengan tempat peneliti dan lebih mengenal karakteristik subjek penelitian. Kedua, dalam lingkup pembinaan, sekolah inklusif berada di bawah satu pembinaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sehingga dapat diketahui dan dilacak informasi-informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif dari SD lain melalui SD yang menjadi lokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pendidikan inklusif didasarkan pada bagaimana pembelajaran berorientasi pada nilai-nilai inklusi yaitu: persiapan pembelajaran, adanya hubungan dan keikutsertaan, mengenali keragaman, tidak merendahkan anak, melibatkan anak, saling bekerja sama, penilaian, saling menghargai, menggunakan media pembelajaran, keterlibatan peran, pengkondisian kelas, sumber pelajaran, perbedaan sebagai sumber, memanfaatkan tenaga ahli, menyediakan sumber belajar yang memadai (Sunanto, 2016, hlm. 83).

Siswa difabel memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan berat ringannya tingkat disabilitas yang dialami dan jenis disabilitas yang disandang. Siswa difabel netra, misalnya, memiliki sifat peraba,

mengandalkan pendengaran dalam mengenali lingkungan, verbalistik, dan hambatan orientasi dan mobilitas. Dengan demikian dalam mengajar mereka harus berorientasi pada karakteristik yang dimiliki siswa difabel netra tersebut yaitu dengan membekali keterampilan dasar yaitu latihan membaca dan menulis Braille sebagai jembatan bagi siswa difabel netra untuk dapat belajar dengan baik.

### 1. SDN Gabus 01 Kecamatan Gabus

Sebagai sekolah inklusif, SD ini menerima siswa difabel yaitu siswa difabel intelektual dan anak hiperaktif. Terdapat 7 siswa difabel yang salah satunya RND, siswa kelas IV, yang diajar Ibu Titik dan TFK, siswa kelas V, yang diajar Ibu Sulasih. Dalam pembelajaran, guru menjelaskan pelajaran seperti mengajar anak biasa tidak menggunakan metode khusus namun jika anak masih belum dapat, guru memberikan bimbingan secara individu. Seperti RND kelas IV sebagai siswa difabel intelektual ringan ketika ditanya, “*mas RND gimana belajar di kelas sama Bu Titik?*” Ia menjawab, “*Saya belajar ya bisa, tetapi harus pelan-pelan dan bila saya nggak bisa lalu diajarin Bu Titik sampai saya bisa*” (RND, 2019).

Sedang TFK, selain karena menyandang disabilitas intelektual berat juga hiperaktif, maka selain ia tidak dapat tenang, kemampuannya intelektualnya sangat rendah sehingga sulit mengikuti pelajaran di kelas. Jika ditanya pelajaran, nama guru, nama anggota keluarga, jawabnya tidak jelas dan harus dituntun jawabnya oleh Ibu Sulasih guru kelasnya. Ia juga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara penuh.

Hasil wawancara dan observasi dalam pembelajaran di kelas inklusi bersama dengan guru kelas Ibu Titik, yang mengajar RND ketika ditanya apa kesulitan yang dihadapi RND:

Kalau RND ini masih bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya, namun memang anak ini butuh dibantu secara individu jika mengalami kesulitan, selama ini yang saya alami hanya dia itu butuh waktu lebih lama setiap mengerjakan tugas (Titik, 2019).

Sedang TFK berdasarkan wawancara dengan ibu Sulasih (guru kelasnya) tentang bagaimana mengajar TFK:

TFK ini memang anaknya selain tidak bisa diam, selalu pergi kemana-mana saat pembelajaran tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran, dan memang memiliki kemampuan intelektual yang sangat rendah sehingga untuk diikutkan dalam pembelajaran di kelas V ini memang kurang bisa mengikuti (Sulasih, 2019).

SD ini belum memiliki guru pembimbing khusus, menurut wawancara dengan Bapak Jalil guru kelas III sebagai berikut:

Di awal-awal [program sekolah] inklusi pernah ada guru kunjung dari SDLB Negeri Pati, namun karena semua guru SLB dan SDLB sekarang berpindah pembinaannya ke Provinsi dan tidak lagi di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten, maka sekarang guru pembimbing khusus sudah tidak ada lagi (Jalil, 2019).

Pembelajaran inklusif di SD Gabus 01 belum sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran inklusif karena masih banyak pembelajaran yang belum tuntas ketika siswa dengan disabilitas intelektual belajar mengalami banyak hambatan. Penyebabnya, sekolah ini tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK) baik dari guru PLB maupun guru yang sudah terlatih sehingga hambatan yang dihadapi anak tidak sepenuhnya ada solusinya dan dipaksa hanya bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan guru kelas. Sehingga ketika TFK sebagai siswa difabel intelektual dan juga hiperaktif, guru hanya mengikuti polanya TFK dan kurang memberikan pembinaan secara maksimal.

Model pembelajaran inklusi sebagaimana yang dilaksanakan Bu Titik dan Bu Sulasih sebenarnya menjadi bukti bahwa terbatasnya guru pembimbing khusus menjadi kendala utama pelaksanaan sekolah inklusif sehingga terpenuhinya GPK sangat menentukan keberlangsungan sekolah inklusif di SD ini.

Sebenarnya kasus yang dihadapi di kelas inklusi Bu Titik dan Bu Sulasih dapat dilakukan dengan menggunakan model *pull out*, yaitu siswa difabel belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ketika siswa difabel mengalami hambatan, anak ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus (Depdiknas, 2005, h. 31).

---

*INKLUSI:*

*Journal of*

*Disability Studies,*

*Vol. 6, No. 1*

*Jan-Jun 2019*

## **2. SDN Kalimulyo 01 Kecamatan Jakenan**

SD inklusif Kalimulyo 01 ini memberikan pembelajaran bagi siswa difabel intelektual dan anak lambat belajar. Di sini terdapat 10 anak lambat belajar dan anak dengan disabilitas intelektual yang berdasarkan hasil asesmen memiliki gradasi IQ antara 66 sampai 77. Itu artinya mereka berada pada kategori disabilitas intelektual ringan dan sedang (wawancara dengan Kepala Sekolah ibu Kartini, 28 Maret 2019). Dari 10 siswa difabel intelektual, wawancara dilakukan dengan MHM yang memiliki IQ 77 (disabilitas intelektual ringan). Ketika ditanya pelajaran apa yang paling dia tidak bisa dan tidak disukai ia menjawab, “Matematika dan PPKN pak, saya tidak bisa, karena kurang bisa perkalian.” Ketika ditanya apakah ia suka belajar di sini, ia menjawab, “Saya suka belajar di sini, tapi sering diejek anak laki-laki.” (MHM, 2019).

Demikian juga dengan NFH IQ 66 (anak dengan disabilitas intelektual sedang). Anak ini mengalami sedikit hambatan dalam mengikuti pelajaran karena memang kemampuan intelektualnya sangat rendah. Ketika ditanya pelajaran apa yang disukai, yang tidak disukai, apa yang dirasa ketika diajarkan guru, dan seterusnya dia menjawab:

Saya tidak bisa semua pelajaran hanya bisa sedikit-sedikit pak, saya tidak suka pelajaran matematika, untuk pelajaran yang lain juga tidak ada yang kusuka, ketika diajarkan Bu guru saya belum bisa paham tapi nanti Bu guru membimbing saya Pak (NFH, 2019).

Hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Agustinah guru kelas II yang mengajar MHM dan NFH ketika ditanya bagaimana mengajar dengan siswa yang bervariasi ada yang normal dan ada siswa difabel:

Saya mengajar sesuai dengan yang saya bisa, karena ada siswa difabel intelektual, ya saya dalam mengajar agak pelan-pelan dan bila belum paham saya akan mendekati secara individu. Kalau MHM lumayan bisa mengikuti tapi kalau NFH agak sulit mengikuti walau sudah saya bimbing secara individu (Agustinah, 2019).

Wawancara dengan KS Ibu Kartini tentang kendala yang dihadapi di SD ini beliau menjawab:

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

Sebenarnya sekolah ini kekurangan guru pembimbing khusus dan pembinaan guru juga kurang, pernah mengikuti pelatihan membuat RPP selama 3 hari pada tanggal 24 - 27 November 2018 dan sudah tidak pernah ada pelatihan di BP Diksus (Balai Pengembangan Pendidikan Khusus) (Kartini, 2019).

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Kalimulyo merupakan bagian dari pelaksanaan inklusi di SD inklusif yang lain, yang masih banyak persoalan terkait dengan penyediaan guru pembimbing khusus dan pemahaman tentang siswa difabel bagi guru atau sekolah mengenai karakteristik dan kebutuhan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak.

Guru pembimbing khusus baik guru dari lulusan S1 PLB maupun guru reguler yang sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran bagi siswa difabel sangat menentukan keberhasilan sekolah inklusi. Tanpa guru pembimbing khusus bila terdapat masalah belajar yang dialami siswa difabel tentunya guru kelas sudah tidak mampu mengatasinya. Akhirnya guru akan mengajar sesuai dengan apa yang diketahui dan dimengerti.

### **3. SDN Puncakwangi 03 Kecamatan Puncakwangi**

SD inklusif ini memberikan kesempatan pembelajaran pada siswa difabel intelektual dan siswa difabel sensorik, yang diajar oleh ibu guru Jumiatur. Di SD inklusif ini memiliki 15 siswa difabel, diantaranya adalah disabilitas intelektual ada: AS IQ 46, lalu DMF IQ 57, MRS IQ 55, dan IR IQ 57. IR adalah siswa difabel sensorik kelas VI yang diajar oleh ibu Jumiatur, ketika ditanya IR menjawab tapi tidak jelas dan cenderung tangannya tidak bisa diam. Saat ditanya namanya kelas berapa, nama gurunya dan lain-lain dia hanya menjawab sepotong-potong seperti kata “as” “nam”, (kelas VI) “umitum” (*jumiatur*), “uni” (mamanya nama Yuni). Semua omongannya terpotong-potong.

Hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Jumiatur guru kelas VI tentang bagaimana mengajar IR siswa difabel sensorik dan bagaimana menghadapi siswa difabel intelektual dalam pembelajarannya:

Saya mengajar secara umum untuk semua siswa setelah itu baru memberikan tugas pada IR dan siswa difabel intelektual kita beri kesempatan untuk mengerjakan tugas baru setelah selesai saya

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

dekatin seperti DM, AS, dan IR, namun IR karena disabilitas sensorik, kalau diberi tugas suruh *nyalin aja* tidak selesai sudah tidak mau (Jumiatun, 2019).

---

*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

Menurut Ahmad Sujai, guru yang mewakili kepala sekolah yang mengurus program inklusi di SD ini, ketika ditanya apakah di sekolah ini memiliki guru pembimbing khusus beliau menjawab: “SD ini belum memiliki guru pembimbing khusus baik dari guru PLB maupun guru yang sudah terlatih dalam menangani siswa difabel.” (Sujai, 2019).

Dari pelaksanaan pembelajaran di SD ini dapat dijelaskan bahwa, guru dalam mengajar kelas yang ada siswa difabel intelektual dan sensorik namun dalam pembelajaran belum terlihat memberikan kesempatan bagi siswa difabel dan masih menggunakan pola pembelajaran biasa. Tidak tampak adanya nilai-nilai inklusi yang harus dipraktikkan dalam pembelajaran, hal ini diduga karena guru sama sekali tidak mengenali karakteristik pola belajar siswa difabel intelektual maupun siswa difabel sensorik.

Mengajar siswa difabel di sekolah inklusif setidaknya harus ada dua aspek yaitu: 1) aspek pemahaman terhadap karakteristik siswa difabel seperti kemampuan, hambatan yang dialami; 2) keterampilan dalam memberikan pembelajaran khusus siswa difabel sesuai dengan keadaan anak jika memang sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK) setidaknya ada pelatihan khusus sebelum menerima siswa difabel sehingga guru kelas dapat memberikan layanan pembelajaran minimal dalam mengatasi hambatan belajar yang dihadapi siswa difabel, sehingga nilai-nilai inklusi dalam pembelajaran tetap diterapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi oleh sejumlah LSM internasional yang menyatakan bahwa pendidikan untuk semua belum terlaksana dan tidak akan terlaksana kecuali adanya partisipasi di tingkat akar rumput dan adanya alokasi sumber-sumber secara nyata (Rakhmawati, 2002, hlm. 8).

#### **4. SDN Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo**

Di sekolah ini siswa difabel yang diajar adalah siswa difabel mental, disabilitas intelektual termasuk di dalamnya lambat belajar, dan siswa difabel sensorik. Di SD ini terdapat 10 siswa difabel di antaranya: DDK

dan AML kelas IV yang diajar Ibu Zubaidah. Ketika ditanya bagaimana DDK sekolah di sini, dapat belajar dengan mudah atau tidak, lalu bagaimana sikap teman-teman terhadap DDK (siswa difabel intelektual), kesulitan apa yang ia rasakan dalam belajar dengan Ibu Zubaidah, DDK menjawab:

Saya senang sekolah di sini pak, bisa bermain dengan teman saya enak, kalau belajar saya kurang bisa seperti teman-teman tapi teman saya baik semua, yang saya merasa sulit itu belajar Matematika sama Bahasa Indonesia pak (DDK, 2019).

Sedangkan AML, hampir semua pertanyaan tidak dijawab secara tuntas karena ia kurang dapat mengendalikan perilakunya dan kurang konsentrasi, hanya menjawab semaunya, bilang, “*suaa*”, “*idak bisa*”, “*elajar*” dan sebagainya (AML, 2019).

Hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah ini menunjukkan bahwa guru mengajar secara umum. Setelah menjelaskan, lalu guru mendekati siswa difabel seperti siswa difabel intelektual (anak lambat belajar). Namun dalam pembelajaran seterusnya anak dibiarkan sampai akhir dan kurang mendapatkan pengawasan dan pendampingan manakala anak mengalami hambatan.

Cara pembelajarannya masih seperti mengajar kelas biasa sehingga siswa difabel terutama siswa difabel intelektual dan sensorik belum bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara penuh. Kendala tersebut berkaitan dengan kekurangtahuan dan tidak ada pemahaman guru terhadap siswa difabel dan juga tidak memiliki guru pembimbing khusus untuk pembelajaran di sekolah inklusi. Setiap anak sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami, maka guru harus mampu mengajar sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Seperti ketika ditanya tentang bagaimana menghadapi kelas yang terdapat siswa difabel intelektual dan siswa difabel sensorik dalam menghadapi pembelajaran, Ibu Zubaidah, guru kelas IV, mengatakan:

Saya juga merasa kurang bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa difabel yang ada di kelas saya. Tapi *gimana* lagi karena ini adalah hal yang harus saya hadapi, maka

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

sebisanya saya lakukan pembelajaran seperti yang saya bisa (Zubaidah, 2019).

Menurut kepala sekolah Pak Zubaidi, di SD inklusif ini belum memiliki guru pembimbing khusus sehingga dalam menangani siswa difabel sepenuhnya dilakukan guru reguler (Zubaidi, 2019).

Berdasarkan pelaksanaan kelas inklusif di SD ini terlihat bahwa setidaknya ada usaha untuk melakukan terobosan dalam rangka mengatasi masalah dalam pembelajaran bagi siswa difabel intelektual, sensorik, dan disabilitas mental. Sebenarnya jika memiliki guru pembimbing khusus dapat diintegrasikan dengan menggunakan model *cluster*, yaitu siswa difabel belajar bersama anak non-difabel di kelas reguler dalam kelompok khusus (Depdiknas, 2005, hlm. 31). Hal ini sesuai dengan konsep sekolah inklusif sebagai sekolah dengan pengajaran yang terpusat pada diri anak (Rakhmawati, 2002, hlm. 19).

#### **D. Kendala dan Upaya Meningkatkan Keberlangsungan Pendidikan Inklusif**

Berdasarkan pelaksanaan inklusi di SD Gabus 01, SD Kalimulyo 01, SD Puncakwangi 03, dan SD Langenharjo 02 diketahui bahwa siswa difabel yang dilayani di SD inklusif mayoritas adalah disabilitas intelektual atau lambat belajar, dan disabilitas sensorik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan berat ringannya dalam layanan pembelajaran, siswa difabel intelektual menurut guru-guru inklusi masih dapat diajar dengan pembelajaran biasa karena anak ini mampu mendengar dan melihat sehingga tidak membutuhkan cara khusus. Pertimbangan yang sebenarnya justru mempersempit dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa difabel karena alasan sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Sebagaimana disampaikan kepala sekolah SD Kalimulyo 01 Ibu Kartini, bahwa hasil *assessment* hanya disabilitas intelektual.

Siswa difabel yang dilayani di SD inklusif yang menjadi subjek penelitian sebagaimana dalam Tabel 1.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaksanaan SD inklusif berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan idealita bahwa dengan

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

adanya sekolah inklusif diharapkan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa difabel untuk bersekolah karena dekat dengan tempat tinggalnya bersama dengan teman sebayanya.

Tabel 1 Partisipan Penelitian

No	Nama Siswa	Sekolah	Jenis Disabilitas	Kelas	Guru	Kepala
1	Rendi	SD Gabus 01	Disabilitas intelektual	IV	Titik	H. Supeno
2	Taufik		Disabilitas intelektual	V	Sulasih	H. Supeno
3	Muhibah H Melysa	SD Kalimulyo 01	Disabilitas intelektual	II	Agustinah	Kartini
4	Naysila F Halwa		Disabilitas intelektual	II	Agustinah	Kartini
5	Irgi	SD Puncakwangi 03	Disabilitas sensorik	VI	Jumiatun	Sri Lestari
6	Muh Rski Setiawan		Disabilitas intelektual	VI	Jumiatun	Sri Lestari
7	Didik	SD Langenharjo 02	Disabilitas intelektual	IV	Zubaidah	Zubaidi
8	Amelia		Disabilitas sensorik	IV	Zubaidah	Zubaidi

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

Tapi kenyataannya dapat dilihat bahwa tidak semua siswa difabel dapat bersekolah di sekolah inklusi, sehingga memungkinkan bagi anak dengan disabilitas fisik seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas daksa tidak sekolah di sekolah inklusif karena adanya pemikiran bahwa mereka akan menyingkirkan anak biasa jika SD tersebut menerima anak yang memiliki disabilitas fisik, seperti yang terjadi di SDN Trangkil 06 salah satu SD inklusif di Kabupaten Pati yang karena terbuka untuk menerima semua siswa difabel justru menjadikan SD ini kehilangan siswa yang normal dan berpotensi tutup karena siswa yang normal pindah di SD lain.

Inilah yang juga menjadi salah satu indikator ketakutan SD inklusif di Kabupaten Pati hanya menangani siswa difabel yang tidak hambatan fisik. Seperti perkataan salah satu guru inklusi:

Kami takut kalau menangani siswa difabel yang tampak secara fisik, akan dihindari oleh siswa yang normal karena SD juga banyak pilihan sehingga merasa khawatir, sebagaimana yang terjadi di SD Trangkil 06.

Inilah yang menyebabkan SD inklusif di Pati rata-rata hanya menerima siswa difabel intelektual atau lambat belajar dan disabilitas sensorik karena secara fisik memang tidak terlihat disabilitasnya.

---

*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

Alasan lain untuk tidak menerima semua jenis siswa difabel di SD inklusif adalah tidak memiliki guru pembimbing khusus, sehingga jika ada hambatan-hambatan yang dialami mereka guru kelas tidak mampu menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan sekolah inklusif yang dilakukan oleh Direktorat PSLB yang menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah inklusif mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik (Pratiwi, 2016, hlm. 240).

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan program pendidikan inklusif harus memiliki guru pembimbing khusus, hal ini juga diperjelas dalam buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 bahwa GPK merupakan guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau sudah memperoleh pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif (Zakia, 2015, hlm. 112).

## **E. Kesimpulan**

Sekolah inklusif merupakan layanan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa difabel untuk berkesempatan mendapatkan pendidikan karena tempatnya terjangkau ketimbang harus sekolah di SLB yang tempatnya jauh.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan sumbangan teori tentang penanganan pendidikan bagi siswa difabel yang terjangkau, adil, merata, tidak diskriminatif, dan meningkatkan keterampilan sosial psikologis pada siswa difabel karena terhapusnya sekat eksklusifitas (SLB) menjadi inklusif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang belum berjalannya sekolah inklusif secara ideal di Kabupaten Pati karena banyaknya kendala yang belum teratasi dan hasil penelitian ini juga menjadi perhatian agar pemerintah segera mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi kendala inklusi tersebut.

*Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati*

Temuan lainnya adalah bahwa pendidikan inklusif selama ini masih mengalami banyak kendala, baik yang bersifat internal (masalah guru, sekolah, fasilitas dll.) maupun yang eksternal (kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dll.). Hambatan dalam pelaksanaan inklusi harus segera diberantas karena hanya melalui pendidikan inklusif inilah yang sangat berpeluang memberikan wadah untuk memberikan hak siswa difabel untuk mendapatkan pendidikan yang tidak bisa diatasi dengan layanan pendidikan eksklusif (SLB) selama ini.

---

*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

## REFERENSI

- Agustinah. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- AML. (2019, Maret 23). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Asiyah, D. (2018). Dampak Pola Pembelajaran Sekolah Inklusi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 1(01). Diambil dari <http://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic/article/view/3480>
- DDK. (2019, Maret 23). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Depdiknas. (2005). *Pedoman Penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusif: Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Evanjeli, L. A. (2015). Model Pendidikan Inklusi Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas. *Jurnal Kependidikan Widya Dharma*, 28(1). Diambil dari [https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/jurnal.php?id=abstraksi&model=volume&id\\_j=18&id\\_m=1106&id\\_k=1231](https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/jurnal.php?id=abstraksi&model=volume&id_j=18&id_m=1106&id_k=1231)
- Isabella, P., Emosda, E., & Suratno, S. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SDN 131/IV Kota Jambi. *Jurnal Tekno-Pedagogi*, 4(2). Diambil dari <https://online-journal.unja.ac.id/pedagogi/article/view/2292>
- Jalil. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Jumiatusun. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *INKLUSI*, 5(2), 179-194. <https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kadir, A. (2016). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3, 1. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.1.1-22>
- Kartini. (2019, Maret 20). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Kemendikbud. (2017, Februari 1). Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi. Diambil 30 Juli 2019, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan website: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>

---

INKLUSI:

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

- Maftuhin, A. (2018). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Negeri-negeri Selatan. *INKLUSI*, 5, 291. <https://doi.org/10.14421/ijds.050207>
- MHM. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Miftahurrahmah, M. (2017). Pembinaan Guru Sekolah Dasar Inklusi Di SD Negeri Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo dan SD Negeri Trangkil 06 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. *Hanata Widya*, 6(5), 90-97.
- NFH. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2). Diambil dari <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pip/article/view/7725>
- Rakhmawati, S. (2002). *Pendidikan Inklusif Ketika hanya ada sedikit sumber. Terjemahan.*
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (cet. 6). Alfabeta.
- Sujai, A. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Sulasih. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Sunanto, J. (2016). Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar. *JASSI ANAKKU*, 8(2), 78-84.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 13(1), 50-61. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Titik. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- UNESCO. (1994). *Penyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus.*
- Zakia, D. L. (2015, November). *Guru Pembimbing Khusus (Gpk): Pilar Pendidikan Inklusi.* Prosiding Seminar dipresentasikan pada Surakarta. Diambil dari <https://docobook.com/guru-pembimbing-khusus-gpk-pilar-pendidikan-inklusi.html>
- Zubaidah. (2019, Maret 23). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].

---

*INKLUSI:*  
*Journal of*  
*Disability Studies,*  
*Vol. 6, No. 1*  
*Jan-Jun 2019*

*Sulthon*

---

*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

*-- left blank --*